

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

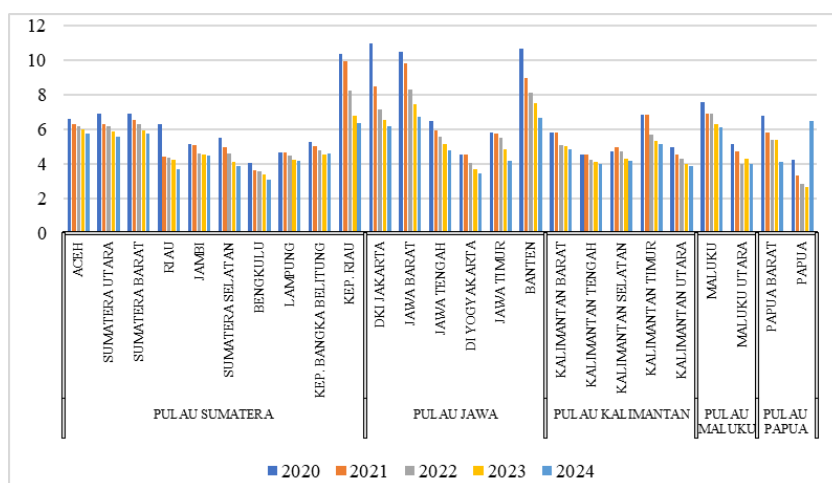
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan fundamental bagi setiap negara di dunia, dan pencapaian target tersebut memerlukan penyelesaian berbagai masalah sosial ekonomi yang mendasar. Indikator kesehatan perekonomian suatu negara dapat tercermin dari kondisi ketenagakerjaan, khususnya melalui proporsi angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja atau sering disebut dengan *excess supply*. Hal ini terjadi ketika jumlah penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) melebihi permintaan tenaga kerja (*demand for labor*). Dalam perspektif teori klasik Adam Smith, kondisi ketidakseimbangan ini menciptakan gap antara individu yang aktif mencari pekerjaan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada sehingga terciptanya pengangguran (Wirabuana, 2024). Tingginya angka pengangguran mengindikasikan adanya disparitas struktural dalam sistem ekonomi suatu negara serta menggambarkan kegagalan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan produktif. Permasalahan ini menjadi semakin krusial bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki populasi dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya (Syukriansyah et. al., 2024).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Kondisi geografis yang tersebar ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan ekonomi dan penyediaan

kesempatan kerja di berbagai wilayah. Sebagai negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas, Indonesia menghadapi masalah ketenagakerjaan yang kompleks dan multidimensional terutama dalam hal pengangguran (Dzikrullah & Abdullah, 2024). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional mencapai 5,32% pada Februari 2024, dengan jumlah pengangguran mencapai 7,20 juta orang. Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun jumlah total pengangguran masih tergolong tinggi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini diperkuat oleh bonus demografi yang dimiliki Indonesia, dimana proporsi penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun mencapai 70,72% dari total populasi, yang seharusnya menjadi modal pembangunan namun dapat berubah menjadi beban jika tidak tersedia lapangan kerja yang memadai (Fitriana, 2024).

Pemerintah Indonesia menargetkan penciptaan lapangan kerja sebagai upaya menurunkan pengangguran. Dalam RPJMN 2020-2024, ditetapkan target penciptaan 2,74 juta lapangan kerja baru per tahun dengan sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,70% pada akhir periode. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan capaian, terutama akibat pandemi COVID-19 yang mendorong TPT meningkat tajam hingga 7,07% pada Agustus 2020, tertinggi dalam satu dekade terakhir. Meskipun perekonomian mulai pulih pasca-pandemi, pencapaian target penciptaan lapangan kerja masih belum optimal. Nurfarkhana dan Priadana (2023) mengungkapkan bahwa kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural, seperti pertumbuhan

ekonomi yang belum berkualitas, investasi yang belum optimal, serta transformasi teknologi yang tidak diimbangi peningkatan keterampilan tenaga kerja, sehingga memperlebar ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah. Grafik berikut menyajikan lima pulau dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Indonesia selama periode 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Gambar 1. 1 TPT Tertinggi di 5 Pulau Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

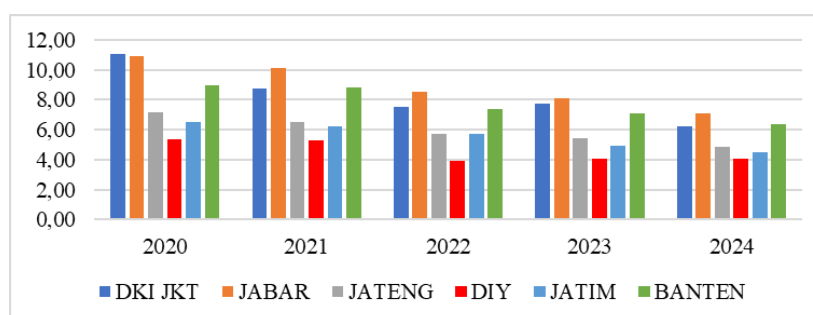
Berdasarkan data lima tahun terakhir, terdapat variasi TPT yang cukup signifikan antarwilayah di Indonesia. Pulau Jawa secara konsisten mencatatkan TPT tertinggi secara nasional, meskipun mengalami penurunan dari 8,32% pada 2020 menjadi 6,24% pada 2024. Pulau Maluku menunjukkan tren penurunan relatif stabil dari 7,57% menjadi 6,31%, sementara Pulau Sumatera mengalami penurunan yang lebih tajam dari 6,88% menjadi 5,94%. Adapun Pulau Kalimantan dan Pulau Papua mencatatkan tingkat TPT yang relatif stabil dengan fluktuasi terbatas di kisaran 5,05% dan 5,38% pada 2024. Perbedaan pola ini mencerminkan karakteristik struktural ekonomi yang berbeda antarwilayah, dimana wilayah berbasis komoditas seperti Sumatera dan Kalimantan sangat dipengaruhi oleh

volatilitas harga ekspor yang menciptakan kesempatan kerja bersifat sementara (Didmanidze et al., 2023).

Pulau Jawa menjadi pusat perhatian karena tingginya tekanan pasar tenaga kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas penyerapan lapangan kerja. Meskipun hanya mencakup 6,76% dari total luas wilayah Indonesia, Pulau Jawa menampung 56,10% populasi nasional dan menyumbang 58,49% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia. Pada Februari 2024, sekitar 4,32 juta atau hampir 60% dari total 7,20 juta pengangguran nasional berada di Pulau Jawa, dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,24%, lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional sebesar 5,32% (BPS, 2024). Hal ini mencerminkan masalah pembangunan ekonomi, dimana konsentrasi aktivitas ekonomi, urbanisasi yang tinggi, serta struktur industri yang cenderung padat modal dan mengalami relokasi belum mampu menciptakan lapangan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja (Todaro & Smith, 2020). Apabila kondisi pengangguran ini berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat, dampaknya dapat meluas pada meningkatnya ketimpangan sosial, menurunnya kesejahteraan rumah tangga, serta berkurangnya efektivitas investasi di wilayah yang memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.

Selain itu, tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa juga menunjukkan adanya masalah struktural yang berbeda antar kelompok tenaga kerja, terutama berdasarkan gender. Tenaga kerja laki-laki dan perempuan cenderung terkonsentrasi pada sektor ekonomi yang berbeda, memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang tidak sama, serta menghadapi hambatan struktural yang

berbeda dalam mengakses pasar kerja. Kondisi ini membuat respons pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan perkembangan teknologi tidak bersifat homogen antar gender. Oleh karena itu, penggunaan model regresi terpisah untuk Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki dan perempuan menjadi penting secara metodologis, karena analisis agregat berpotensi menutupi perbedaan pengaruh variabel ekonomi terhadap masing-masing kelompok dan menghasilkan estimasi yang bias (Wooldridge, 2016). Pendekatan ini juga memungkinkan perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan sensitif terhadap perbedaan karakteristik pasar kerja Laki-laki dan Perempuan (Silvia & Susilowati, 2023). Gambaran lebih rinci mengenai kondisi tersebut dapat dilihat melalui grafik Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki di enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Gambar 1. 2 TPT Laki-laki Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024

(Persen)

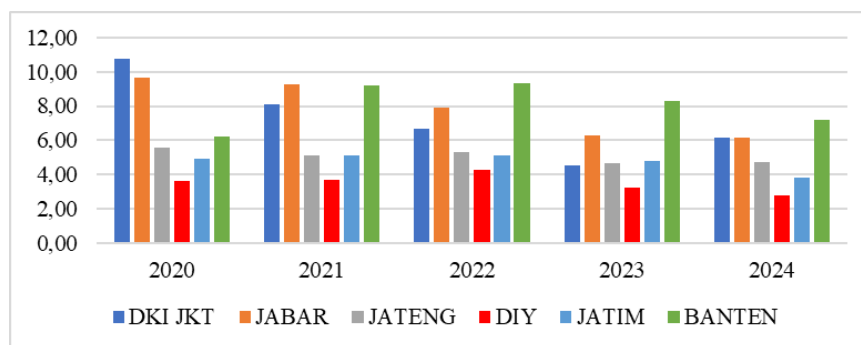
Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki di Pulau Jawa periode 2020-2024, DKI Jakarta dan Jawa Barat secara konsisten mencatatkan tingkat pengangguran tertinggi meskipun menunjukkan tren penurunan. Di DKI Jakarta, TPT laki-laki turun dari 11,06% pada 2020 menjadi 6,23% pada 2024,

sementara di Jawa Barat menurun dari 10,91% menjadi 7,12% pada periode yang sama (BPS, 2024). Tingginya pengangguran di kedua provinsi tersebut berkaitan dengan urbanisasi yang cepat, ketimpangan keterampilan tenaga kerja, serta tingginya persaingan pencari kerja yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja formal. Sebaliknya, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur menunjukkan tingkat pengangguran laki-laki yang relatif lebih rendah dan stabil, dengan penurunan masing-masing dari 7,13% menjadi 4,83%, 5,37% menjadi 4,06%, dan 6,48% menjadi 4,46% selama periode pengamatan. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural karena masih tingginya proporsi pekerja informal, migrasi keluar tenaga kerja usia produktif, serta keterbatasan diversifikasi ekonomi di wilayah perdesaan (Todaro & Smith, 2020). Banten juga menunjukkan perbaikan dengan penurunan TPT laki-laki dari 8,94% pada 2020 menjadi 6,38% pada 2024, meskipun sebelumnya terdampak perlambatan industri pengolahan dan ketergantungan pada sektor manufaktur.

Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki di Pulau Jawa tersebut sebagian didorong oleh peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk proyek transportasi, energi, dan kawasan industri, yang memperluas kesempatan kerja jangka pendek, khususnya di sektor konstruksi dan logistik (Wijaya, 2021). Pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi juga berkontribusi terhadap meningkatnya permintaan tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kualitas pasar kerja, karena sebagian tenaga kerja laki-laki terdorong menerima pekerjaan dengan upah rendah atau berpindah ke sektor

informal akibat tekanan ekonomi, yang mengindikasikan masih lemahnya daya serap lapangan kerja formal (Widodo & Kusuma, 2024).

Di sisi lain, dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka perempuan menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan laki-laki, terutama terkait tingkat partisipasi kerja, jenis sektor yang dimasuki, serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi makro (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Di Pulau Jawa, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional, perempuan sering menghadapi hambatan struktural dalam mengakses pekerjaan formal, termasuk keterbatasan kesempatan kerja yang sesuai dengan keterampilan dan peran ganda dalam rumah tangga (Miranti et al., 2022). Berikut ini grafik TPT Perempuan di Pulau Jawa dalam 5 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

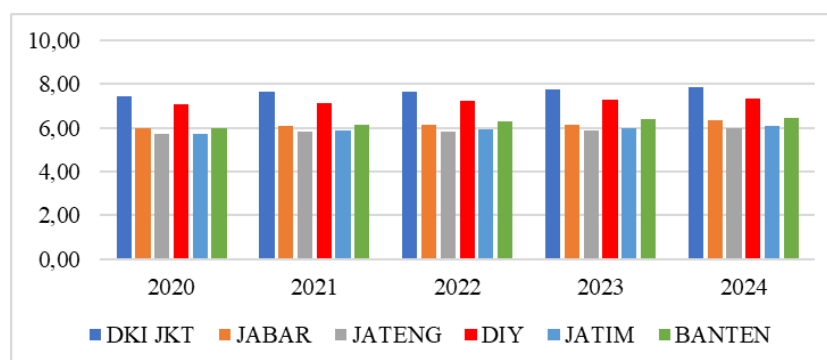
Gambar 1. 3 TPT Perempuan Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024
(Persen)

Data menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan di Pulau Jawa selama periode 2020-2024 cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan laki-laki, mencerminkan kerentanan perempuan terhadap perubahan kondisi pasar kerja (BPS, 2024). DKI Jakarta mengalami penurunan TPT perempuan yang cukup tajam dari 10,76% pada 2020 menjadi 6,17% pada 2024, seiring ekspansi sektor

jasa modern seperti keuangan, teknologi informasi, dan perdagangan yang menyerap tenaga kerja perempuan berpendidikan tinggi (Kusumawati & Nugraha, 2024). Sebaliknya, Banten menunjukkan peningkatan TPT perempuan dari 6,21% menjadi 7,20%, mengindikasikan hambatan struktural berupa keterbatasan sektor formal yang ramah perempuan dan persistensi bias gender dalam rekrutmen (Budiman & Sari, 2023). Kemudian provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami penurunan yang lebih moderat melalui penyerapan di sektor manufaktur padat karya, meskipun masih didominasi pekerjaan informal dan berupah rendah. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten mencatat TPT perempuan terendah pada kisaran 2,78-4,27%, didukung oleh basis ekonomi pendidikan, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang relatif inklusif bagi perempuan (BPS, 2024).

Pola tersebut mengindikasikan bahwa pengangguran perempuan tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro, tetapi juga oleh struktur pasar kerja yang tersegmentasi dan bias gender. Perempuan masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang relatif kurang stabil, serta menghadapi hambatan karier seperti *glass ceiling effect* atau hambatan tak terlihat yang menghambat kemajuan karir (Utari & Dewi, 2023). Hal ini sejalan dengan teori Segmentasi Pasar Kerja (Doeringer & Piore, 2020) yang menjelaskan adanya preferensi diskriminatif pemberi kerja terhadap perempuan. Bahkan, meskipun tingkat pendidikan perempuan terus meningkat, mereka tetap mengalami penalti upah sekitar 20-25% lebih rendah dibandingkan laki-laki dan peluang kerja yang lebih sempit, khususnya bagi perempuan menikah atau memiliki anak kecil (Suhartini et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, faktor struktural seperti kemajuan teknologi yang berkembang pesat berpotensi mempengaruhi dinamika pasar tenaga kerja dan ketimpangan gender. Menurut BPS (2015) Indeks Pembangunan Teknologi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah. Nilai IP-TIK secara tidak langsung dapat mengukur kesiapan suatu wilayah atau negara menuju era masyarakat informasi (*Information Society*). Dalam era Revolusi Industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi pendorong bagi transformasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan teori *creative destruction* yang dikemukakan oleh Schumpeter (1942) dalam Wafa (2025), inovasi teknologi menciptakan proses yang bersifat "menghancurkan" lapangan kerja lama namun secara bersamaan "menciptakan" lapangan kerja baru yang lebih produktif. Pola perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di Pulau Jawa dapat dilihat dalam grafik data berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Gambar 1. 4 IP-TIK Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Indeks)

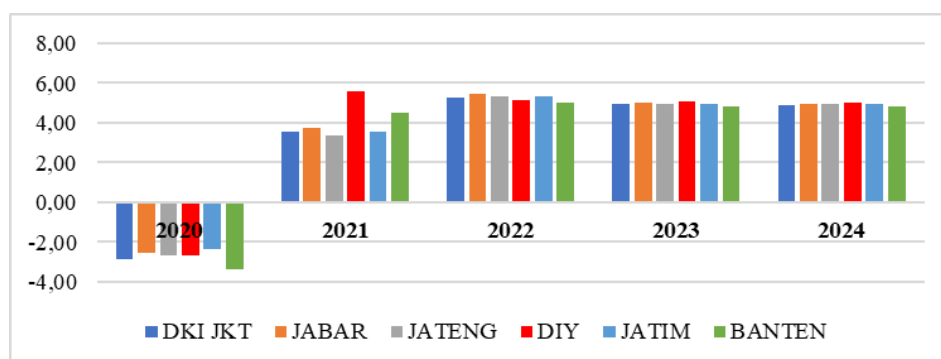
Data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) menunjukkan peningkatan yang konsisten di seluruh provinsi Pulau Jawa, meskipun dengan tingkat capaian yang berbeda. DKI Jakarta mencatat IP-TIK

tertinggi sebesar 7,88 pada 2024, diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 7,36, mencerminkan keunggulan infrastruktur digital, penetrasi internet, dan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih berada pada kisaran 5,98 sampai 6,46, yang menunjukkan adanya disparitas kesiapan digital antarprovinsi. Dalam konteks ketenagakerjaan, perkembangan TIK memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ekspansi ekonomi digital menciptakan peluang kerja fleksibel di sektor *e-commerce*, *fintech*, *edutech*, dan industri kreatif yang relatif lebih mudah diakses oleh perempuan, khususnya yang berpendidikan tinggi (Fauzi & Rahmawati, 2023). Namun di sisi lain, transformasi digital juga mendorong perubahan hubungan kerja menuju *gig work* dan *freelancing* yang lebih tidak pasti (Kenney & Zysman, 2016), serta memicu pengangguran teknologi akibat otomatisasi pekerjaan rutin, terutama di sektor manufaktur Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebelumnya banyak menyerap tenaga kerja perempuan (Nugroho & Santoso, 2024).

Kondisi ini sejalan dengan teori *skill-biased technological change* yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi meningkatkan permintaan tenaga kerja berkeahlian tinggi dan menurunkan permintaan tenaga kerja berkeahlian rendah (Autor, 2022). Studi Khoirunurrofik et al. (2023) menegaskan bahwa perkembangan TIK cenderung menurunkan pengangguran di wilayah dengan infrastruktur digital yang kuat, tetapi justru dapat meningkatkan pengangguran di wilayah yang belum siap secara digital. Rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang STEM semakin memperkuat kerentanan perempuan berkemampuan rendah dalam mengakses pekerjaan berteknologi tinggi, sehingga digitalisasi berpotensi

memperlebar kesenjangan gender di pasar kerja Pulau Jawa (Brusseovich et al., 2018).

Indikator lain yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Dalam Hukum Okun (*Okun's Law*) menjelaskan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, di mana setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 1% di atas tingkat potensial dapat menurunkan pengangguran sekitar 0,5%. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja, sehingga menekan tingkat pengangguran. Namun, dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut bersifat elastis karena penurunan pengangguran baru terjadi secara signifikan apabila pertumbuhan ekonomi mencapai minimal 5,5% (Sukirno, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa, belum sepenuhnya bersifat inklusif dan masih didominasi oleh sektor-sektor padat modal dengan daya serap tenaga kerja yang relatif rendah, seperti pertambangan dan manufaktur berat. Berikut ini grafik data pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa selama 5 tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

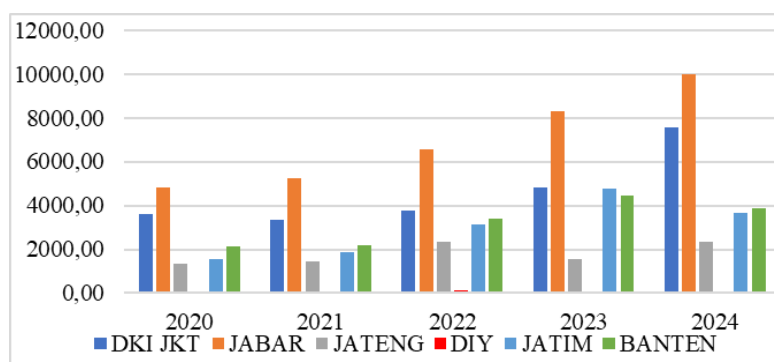
Gambar 1. 5 LPE Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen)

Data LPE menunjukkan kontraksi ekonomi yang tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, dengan seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan negatif, di mana Banten mencatat kontraksi terdalam akibat penutupan pabrik dan gangguan rantai pasok global. Pemulihan ekonomi terjadi pada 2021 dan menguat hingga 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,03% hingga 5,45%, kemudian melambat sebesar 4,79% hingga 5,03% pada 2023-2024. Dalam konteks gender, hubungan antara LPE dan TPT menunjukkan adanya perbedaan dampak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dijelaskan oleh teori segmentasi pasar kerja (Doeringer & Piore, 2020), bahwa dampak pertumbuhan terhadap pengangguran bergantung pada sektor penggerak ekonomi. Jika pertumbuhan didorong oleh sektor yang menyerap banyak tenaga kerja perempuan seperti garmen dan perdagangan, maka TPT perempuan menurun. Sebaliknya, dominasi sektor padat modal menyebabkan TPT laki-laki lebih terpengaruh.

Penelitian Sutrisno dan Lestari (2023) menemukan bahwa elastisitas TPT perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa lebih rendah dibandingkan laki-laki, mencerminkan ketimpangan akses terhadap manfaat pertumbuhan. Hal ini sejalan dengan teori segmentasi pasar kerja yang menyatakan bahwa laki-laki cenderung diprioritaskan dalam rekrutmen saat ekonomi tumbuh, sedangkan perempuan menjadi cadangan tenaga kerja yang mudah terdampak ketika terjadi perlambatan ekonomi. temuan ini diperkuat oleh Pratiwi dan Handayani (2024) yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Pulau Jawa belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja bagi perempuan secara

proporsional, karena pertumbuhan output tidak diikuti peningkatan lapangan kerja bagi perempuan.

Penanaman Modal Asing (PMA) juga menjadi faktor yang signifikan dalam dinamika ketenagakerjaan, khususnya di Pulau Jawa. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan bahwa investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), berperan sebagai penggerak utama yang mendorong akumulasi modal, transfer teknologi, serta penciptaan lapangan kerja. PMA tidak hanya menciptakan lapangan kerja langsung melalui perusahaan asing, tetapi juga memberikan dampak tidak langsung melalui keterkaitan sektor hulu dan hilir (*backward* dan *forward linkages*) pada sektor-sektor terkait. Penelitian Lipsey dan Sjöholm (2021) menunjukkan bahwa PMA di Indonesia termasuk di Pulau Jawa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja melalui alih keterampilan dan teknologi. Namun, dampak PMA terhadap pengangguran bervariasi tergantung pada sektor investasinya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

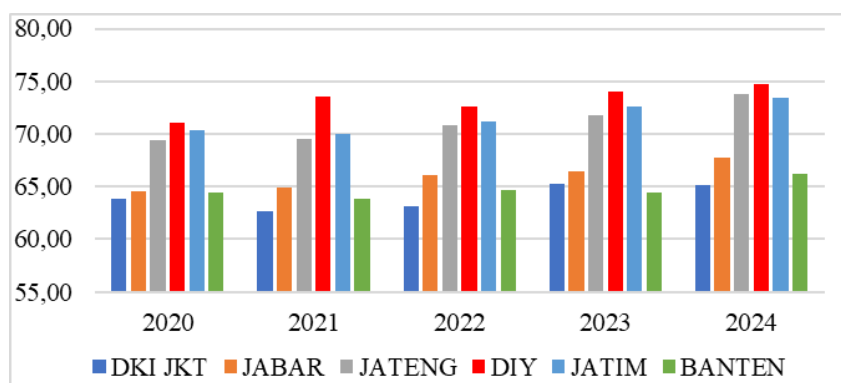
Gambar 1. 6 PMA Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (USD)

Data PMA di Pulau Jawa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama 2020-2024, terutama di Jawa Barat yang tumbuh dari USD 4.793,70 juta menjadi USD 9.972,30 juta, menjadikannya tujuan utama investasi asing di Pulau

Jawa. DKI Jakarta juga mencatat peningkatan besar karena perannya sebagai pusat bisnis dan keuangan, sementara provinsi lain seperti Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Berdasarkan teori *FDI-OLI Paradigm* oleh John Dunning dalam (Lipsey & Sjöholm, 2021), PMA menciptakan lapangan kerja secara langsung, tidak langsung, dan melalui efek turunan terhadap konsumsi masyarakat. Namun, penelitian menunjukkan adanya perbedaan dampak antara laki-laki dan perempuan. Budiman dan Sari (2023) menemukan bahwa PMA di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki di Jawa Barat banyak menyerap tenaga kerja perempuan dengan upah rendah, sedangkan sektor padat modal seperti otomotif dan industri berat didominasi laki-laki dengan upah lebih tinggi. Di sisi lain, studi Kusumawati dan Nugraha (2024) mengungkapkan bahwa PMA di sektor jasa modern seperti keuangan dan teknologi informasi membuka peluang kerja berkualitas bagi perempuan berpendidikan tinggi, meskipun aksesnya masih terbatas. Secara keseluruhan, PMA berpotensi mendukung kesetaraan gender di pasar kerja, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dan memiliki hubungan yang kompleks dengan tingkat pengangguran. Berdasarkan teori Malthus (1798) dalam (Nisa & Sugiharti, 2022), peningkatan TPAK tanpa diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai dapat meningkatkan tekanan di pasar kerja dan mendorong kenaikan pengangguran. Fenomena *discouraged worker effect* juga dapat menurunkan TPAK ketika individu

berhenti mencari kerja akibat frustrasi. Di Indonesia, TPAK perempuan secara historis lebih rendah dibandingkan laki-laki karena adanya hambatan struktural dan kultural (Schaner & Das, 2023). Peningkatan TPAK dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada kondisi ekonomi daerah, di wilayah dengan sektor ekonomi yang dinamis, peningkatan TPAK dapat menurunkan pengangguran, sedangkan di daerah dengan lapangan kerja terbatas dapat memperburuk pengangguran. Di Pulau Jawa, peningkatan TPAK justru cenderung berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran, baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja produktif.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar 1. 7 TPAK Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024 (Persen)

Data menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa relatif stabil namun bervariasi antarprovinsi. Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur memiliki TPAK tertinggi sebesar 69% hingga 74% karena dominasi sektor agraris dan informal, sedangkan DKI Jakarta dan Banten mencatat TPAK terendah yaitu sebesar 63% hingga 67% akibat struktur ekonomi yang lebih maju dan preferensi sosial tertentu. Secara gender, TPAK laki-laki selalu berada di atas

80%, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya di kisaran 52% hingga 55%, hal ini dipengaruhi oleh tanggung jawab domestik serta keterbatasan fasilitas penitipan anak dan lansia (Arifin & Dewi, 2023). Berdasarkan teori *labor supply economics*, keputusan individu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat, termasuk pendapatan yang diharapkan dan kesempatan waktu. Hubungan antara TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bersifat tidak linear, peningkatan TPAK dapat menurunkan atau meningkatkan pengangguran tergantung pada kondisi pasar kerja. Di Pulau Jawa, peningkatan TPAK perempuan pascapandemi banyak dipicu oleh kebutuhan ekonomi dan peningkatan pendidikan, namun belum diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya pengangguran perempuan (Hidayati & Kurniawan, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya dorongan masuknya perempuan ke pasar kerja karena tekanan ekonomi, yang berlawanan dengan kecenderungan sebagian laki-laki untuk menarik diri dari pasar kerja setelah berulang kali gagal memperoleh pekerjaan.

Peningkatan dan variasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, khususnya pada perempuan, menunjukkan bahwa tekanan pasar tenaga kerja di Pulau Jawa tidak hanya berasal dari keterbatasan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari meningkatnya pasokan tenaga kerja yang belum terserap secara optimal. Kondisi ini semakin kompleks mengingat Pulau Jawa merupakan wilayah terpadat di Indonesia, yang menampung 56,10% populasi nasional dan menyumbang 58,49% terhadap PDB nasional, dengan konsentrasi aktivitas ekonomi tertinggi, ditandai

oleh nilai IP-TIK yang relatif tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta arus investasi yang besar. Namun, keunggulan ekonomi tersebut tidak sepenuhnya diikuti oleh kemampuan penyerapan tenaga kerja yang seimbang, tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Jawa yang secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam pasar tenaga kerja, terutama terkait perbedaan karakteristik dan peluang kerja antara laki-laki dan perempuan. Urgensi penelitian ini semakin kuat karena studi-studi sebelumnya, seperti Ardian et al. (2022), Fikri & Alianis (2023), dan Aulia et al. (2024), umumnya masih menganalisis pengangguran secara agregat tanpa membedakan dinamika berbasis gender.

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus menganalisis determinan Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki dan perempuan secara terpisah menggunakan data panel enam provinsi di Pulau Jawa periode 2012–2024, dengan kebaruan pada pemanfaatan variabel Penanaman Modal Asing (PMA) dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), serta cakupan periode analisis yang mencakup berbagai guncangan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai: **Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2012–2024: Analisis Perbedaan Gender** dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap isu ketimpangan gender.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh IP-TIK, LPE, PMA, dan TPAK secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki dan Perempuan di Pulau Jawa tahun 2012-2024?
2. Bagaimana pengaruh IP-TIK, LPE, PMA, dan TPAK secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki dan Perempuan di Pulau Jawa tahun 2012-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh IP-TIK, LPE, PMA, dan TPAK secara parsial terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki dan Perempuan di Pulau Jawa tahun 2012-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh IP-TIK, LPE, PMA, dan TPAK secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Laki-laki dan Perempuan di Pulau Jawa tahun 2012-2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang dapat diidentifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut adalah uraian mengenai kegunaan penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi ketenagakerjaan dan kebijakan publik melalui analisis pengaruh Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka berbasis gender di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IP-TIK sebagai *novelty* penelitian berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap TPT laki-laki maupun perempuan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan teknologi belum diikuti kesiapan keterampilan tenaga kerja. Sebaliknya, PMA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kedua kelompok gender serta memiliki dampak lebih kuat terhadap penyerapan tenaga kerja perempuan, sehingga menunjukkan peran investasi asing sebagai faktor penting dalam pengurangan pengangguran yang lebih inklusif.

Selain memperkaya literatur empiris berbasis gender yang masih terbatas di Indonesia, hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagi perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran, khususnya melalui penguatan pelatihan keterampilan digital, peningkatan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta optimalisasi kebijakan investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pengembangan teori mengenai determinan pengangguran, tetapi juga menyediakan dasar empiris bagi kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika struktur ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkeadilan gender. Hasil penelitian ini membantu meningkatkan strategi penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pemerataan kesempatan kerja di Pulau Jawa.

Bagi penulis, Penelitian ini memberikan pengalaman empiris bagi penulis dalam menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi pengangguran serta memperdalam pemahaman tentang perbedaan gender di pasar kerja, sebagai dasar pengembangan kajian ekonomi ketenagakerjaan.

Bagi pembaca, Penelitian ini memberikan informasi dan pemahaman mengenai kondisi dan determinan pengangguran di Pulau Jawa, sehingga dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat yang tertarik pada isu ketenagakerjaan dan kesetaraan gender.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

15.1 Lokasi Penelitian

Secara geografis, lokasi penelitian ini adalah 6 provinsi di Pulau Jawa yang berfungsi sebagai unit analisis utama dan memungkinkan peneliti untuk mengamati pengaruh IP-TIK, LPE, PMA dan TPAK terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan gender. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder *time series* dan *cross-section* periode 2012-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini akan dilaksanakan terhitung dari bulan September 2025 sampai dengan Mei 2026. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Waktu Penelitian

[illegible]